

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENYUSUN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020 – 2024
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dan perumusan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu untuk membentuk Tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari Pengarah, Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengumpulkan bahan dan menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- b. memberikan masukan dan tanggapan untuk penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; dan

- c. memberikan masukan program kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 untuk mencapai peningkatan indeks Reformasi Birokrasi setiap tahunnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 5 (lima) bulan terhitung dari bulan Maret sampai dengan Juli 2020.
- KELIMA : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUN ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-
2024 LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 95 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi	Honorarium
Pengarah	Roni Dwi Susanto	Kepala LKPP	750.000
Ketua	Gusmelinda Rahmi	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	650.000
Anggota			
	1. Sarah Arlina	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	500.000
	2. Angga Sanjaya Lingga	Biro Umum dan Keuangan	500.000
	3. Festiana Niyanti	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	500.000
	4. Tri Tarwoco	Inspektorat	500.000
	5. Angga Widita Amirul	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	500.000
	6. Tri Susanto	Direktorat Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	500.000
	7. Satriyo Wibowo	Direktorat Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	500.000
	8. Anastasia Citra Puspita	Direktorat Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	500.000

9.	Widya Prima Sari Fultanegara	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	500.000
10.	Devi Yanurida	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	500.000
11.	Mohamad Irvan Faradian	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	500.000
12.	Anita Carollin	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	500.000
13.	Yohana Surat Payon Philips	Direktorat Sertifikasi Profesi	500.000
14.	Sugianto	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	500.000
15.	Muhamad Dwi Sumanto	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	500.000
16.	Inamawati Mastuti Dewi	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO